

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berada di kawasan yang sangat rawan bencana karena letaknya tepat pada persilangan tiga lempeng tektonik besar dan dikelilingi cincin gunung api aktif. Kondisi geografis ini membuat berbagai bencana terjadi secara berulang sepanjang tahun dan memengaruhi jutaan penduduk di banyak wilayah. Gempa bumi, letusan gunung api, banjir, maupun kekeringan muncul silih berganti, menandai meningkatnya intensitas dan ragam ancaman yang harus dihadapi. Selama tahun 2024, tercatat sebanyak 3.472 peristiwa bencana alam yang meliputi banjir, longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga kebakaran hutan dan lahan. Bencana banjir memiliki kejadian dengan persentase terbesar sebanyak 77,44% di Indonesia.¹ Catatan ini memperlihatkan betapa tingginya ketidakpastian yang dihadapi masyarakat Indonesia, sehingga kesiapsiagaan menjadi kebutuhan yang tak terelakkan.

Kebutuhan akan kesiapsiagaan ini semakin mendesak ketika dihadapkan pada ancaman bencana spesifik di tingkat regional, terutama mengingat tingginya persentase kejadian banjir di Indonesia sebagaimana data BNPB di atas. Dalam konteks ini, Kota Bekasi menjadi contoh wilayah yang menghadapi ancaman berulang karena kota ini adalah daerah yang selalu terjadi bencana banjir terutama di musim penghujan. Kerawanan banjir di Kota Bekasi didukung oleh kondisi fisik yang menyebabkan terjadinya banjir lokal. Kondisi fisik tersebut meliputi kemiringan lereng yang sebagian besar datar, perubahan penggunaan lahan yang signifikan sehingga air hujan maupun air limpasan tidak terserap dengan baik, jenis tanah yang kurang peka untuk meloloskan air, serta curah hujan dengan tingkat sedang 2000-2500 mm/tahun. Realitas ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana, khususnya banjir di Kota Bekasi,

¹ Rosyida, A., 2025. DATA BENCANA INDONESIA 2024. Jakarta: Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

memerlukan upaya berkelanjutan dan terstruktur, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari keterlibatan masyarakat sipil.²

Bencana yang menimpa wilayah padat penduduk seperti Bekasi tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menuntut kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko yang menyertainya. Kondisi wilayah yang padat penduduk dengan tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi menyebabkan dampak bencana dapat dirasakan secara luas apabila tidak diimbangi dengan kesiapsiagaan yang memadai. Oleh karena itu, penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan intervensi pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan kesiapan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.



Gambar 1. 1 Data Bencana Banjir Kota Bekasi

Gambar 1.1 menyajikan data kejadian bencana banjir di Kota Bekasi yang bersumber dari Laporan Tahunan (*Log Book*) BPBD Kota Bekasi. Data tersebut mencatat kejadian banjir yang terjadi di wilayah Kota Bekasi selama periode 2021–

² Hafizhan, A., & Priyana, Y. (2020). Analisis faktor–faktor penyebab banjir di kota bekasi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

2025. Dalam penelitian ini, banjir dipahami sebagai peristiwa meluapnya air yang menggenangi daratan dalam kurun waktu lebih dari 24 jam, dengan ketinggian air umumnya melebihi 40 cm serta berdampak pada area yang cukup luas. Berdasarkan data BPBD Kota Bekasi, jumlah kejadian banjir menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 – 2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 15 kejadian banjir, kemudian meningkat menjadi 16 kejadian pada tahun 2022. Jumlah tersebut menurun menjadi 13 kejadian pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 17 kejadian pada tahun 2024. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2025 dengan jumlah kejadian mencapai 35 kasus. Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana banjir di Kota Bekasi masih cukup tinggi dan memerlukan upaya mitigasi serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan melalui program pengurangan risiko bencana.



Gambar 1. 2 Data Bencana Banjir Kelurahan Duren Jaya

Gambar 1.2 menyajikan data kejadian bencana banjir di Kelurahan Duren Jaya yang bersumber dari Laporan Tahunan (*Log Book*) BPBD Kota Bekasi. Berdasarkan data tersebut, jumlah kejadian banjir di Kelurahan Duren Jaya menunjukkan

kecenderungan meningkat selama periode 2021 – 2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5 kejadian banjir, kemudian meningkat menjadi 6 kejadian pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah kejadian relatif tetap, yaitu sebanyak 6 kejadian. Selanjutnya, jumlah kejadian meningkat menjadi 8 kejadian pada tahun 2024 dan mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai 21 kejadian. Ketidakstabilan tersebut menunjukkan bahwa ancaman banjir di Kelurahan Duren Jaya masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat kembali dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menegaskan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan yang konsisten terhadap bencana banjir, sehingga diperlukan upaya kesiapsiagaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan melalui program berbasis komunitas seperti KATANA.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan adalah pengembangan program Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) sebagai bentuk penyesuaian dari konsep Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini bertujuan menumbuhkan kapasitas warga kelurahan agar mampu mengenali potensi bahaya, menyusun rencana kedaruratan, serta mengelola mitigasi berbasis potensi lokal. Dengan pendekatan ini, masyarakat didorong untuk berperan aktif bukan sekadar menjadi pihak yang menunggu intervensi pemerintah. KATANA memberikan pedoman yang lebih terarah bagi pemerintah kelurahan untuk mengembangkan strategi kesiapsiagaan yang sesuai dengan karakter wilayahnya. Selain itu, program ini membantu menyelaraskan hubungan kerja antara pemerintah daerah, aparat kelurahan, dan warga. Dengan demikian, KATANA menjadi fondasi penting dalam membangun budaya sadar bencana di kawasan perkotaan.

Pelaksanaan KATANA di Kota Bekasi digerakkan oleh BPBD sebagai upaya membentuk komunitas yang tangguh menghadapi ancaman bencana. Menurut hasil wawancara dengan anggota BPBD Kota Bekasi, Terdapat sebanyak 86 anggota BPBD termasuk anggota yang tidak turun saat terjadi bencana banjir. Oleh karena itu, kurangnya anggota BPBD saat terjadi bencana banjir mengakibatkan tidak semua evakuasi yang dilakukan berjalan dengan efektif. Hal ini menjadi dasar terbentuknya program KATANA di Kota Bekasi. Program KATANA yang diselenggarakan meliputi

pelatihan KELANA (Keluarga Tanggap Bencana), pembentukan Satgas Kelurahan Tangguh Bencana, latihan evakuasi, serta penyusunan rencana kontinjensi skala kelurahan.

Rangkaian ini menekankan pentingnya kemampuan teknis yang perlu dimiliki warga agar mereka dapat bertindak cepat dan tepat ketika situasi darurat terjadi. Kelurahan memiliki peran sentral sebagai jembatan yang menyampaikan arah kebijakan BPBD kepada masyarakat, salah satu kelurahan yang mengikuti program KATANA adalah Kelurahan Duren Jaya, Kota Bekasi. Menurut hasil wawancara dengan ketua KATANA Kelurahan Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya memiliki bentuk lokasi seperti mangkuk yang cekung kedalam. Hal ini mengakibatkan, terdapat beberapa RW di Kelurahan Duren Jaya yang lebih rawan terkena banjir. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KATANA di Kelurahan Duren Jaya sangat bergantung pada keterlibatan aktor-aktor lokal di tingkat komunitas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Peran organisasi kepemudaan di tingkat lokal memiliki kontribusi penting dalam upaya kesiapsiagaan bencana. Salah satu organisasi yang berperan aktif di lingkungan masyarakat adalah Karang Taruna yang merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di tingkat kelurahan dan rukun warga (RW). Karang Taruna memiliki potensi strategis sebagai agen penggerak partisipasi sosial karena anggotanya berada pada usia produktif, memiliki mobilitas tinggi, serta kedekatan langsung dengan kondisi sosial dan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam konteks penanggulangan bencana, Karang Taruna dapat berperan dalam kegiatan edukasi kebencanaan, koordinasi evakuasi, distribusi bantuan darurat, serta pendampingan masyarakat pascabencana.

Tingginya tingkat kerentanan terhadap banjir menjadikan Kelurahan Duren Jaya, khususnya RW 10 dan RW 11, sebagai wilayah yang paling berisiko terdampak banjir dibandingkan area lainnya. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan pengelola KATANA Kelurahan Duren Jaya, yang menjelaskan bahwa kondisi geografis RW 10 dan RW 11 berada pada area cekungan dan memiliki kemampuan menyerap air yang terbatas sehingga sering mengalami genangan dengan intensitas dan

durasi yang lebih lama. Dalam kondisi tersebut, Karang Taruna RW 10 dan RW 11 berperan penting dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat. Karang Taruna di kedua RW ini tidak hanya berfungsi sebagai organisasi pemuda tetapi juga bisa menjadi mitra penting dalam program KATANA melalui partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan penyampaian informasi kesiapsiagaan, simulasi evakuasi, serta mengelola warga saat terjadi bencana banjir. Karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11 sebagai bagian dari elemen masyarakat yang secara langsung terlibat dalam aktivitas kesiapsiagaan dan respon awal bencana di wilayah paling rawan banjir di Kelurahan Duren Jaya.

Karang Taruna di Kelurahan Duren Jaya merupakan kelompok pemuda yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam upaya kesiapsiagaan bencana banjir. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola KATANA Kelurahan Duren Jaya, jumlah anggota di RW 10 dan RW 11 tercatat sebanyak 51 orang, yang terdiri atas 37 laki-laki (72,5%) dan 14 perempuan (27,5%). Secara rinci, anggota Karang Taruna di RW 10 terdiri dari 15 laki-laki dan 6 perempuan, sedangkan di RW 11 terdiri dari 22 laki-laki dan 8 perempuan. Dari sisi karakteristik anggota Karang Taruna berada pada rentang usia 16–50 tahun yang merupakan kelompok potensial untuk dilibatkan dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Berdasarkan latar belakang pekerjaan, anggota aktif Karang Taruna didominasi oleh pekerja sektor ritel dan jasa sebanyak (63,3%), diikuti oleh pekerja pada bidang transportasi dan logistik sebesar (26,7%), serta pelajar atau mahasiswa sebesar (10%). Dari total 51 anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11, terdapat 30 anggota aktif yang secara konsisten terlibat dalam kegiatan organisasi dan program kesiapsiagaan bencana. Anggota aktif tersebut terdiri atas 19 laki-laki (63,3%) dan 11 perempuan (36,7%) yang menjadi sasaran sekaligus modal sosial penting dalam pelaksanaan Program KATANA di Kelurahan Duren Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11, terlihat bahwa meskipun sebagian besar anggota berada dalam usia dewasa dan telah memiliki pengalaman dalam menghadapi banjir, kebutuhan akan sosialisasi dan penguatan kesiapsiagaan tetap dianggap penting. Sampai saat ini tindakan yang

dilakukan saat terjadi banjir lebih bersifat spontan dan tidak didasarkan pada kebiasaan yang terstruktur. Kesadaran tentang prosedur kesiapsiagaan, alur koordinasi, serta pembagian peran yang jelas masih kurang. Keterlibatan anggota dalam penanganan banjir sebelumnya juga lebih cenderung bersifat tanggap seperti membantu evakuasi atau pembersihan lingkungan, tanpa didahului oleh perencanaan kesiapsiagaan yang matang. Minimnya pemahaman terhadap rencana siaga, jalur evakuasi resmi, serta mekanisme koordinasi dengan pihak kelurahan dan BPBD menunjukkan bahwa peran pemuda belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, sosialisasi melalui Program KATANA dianggap sebagai kebutuhan untuk menyamakan persepsi, memperjelas peran, serta membangun kesiapan perilaku kolektif, sehingga anggota Karang Taruna tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga siap bertindak secara terkoordinasi sebagai aktor kunci dalam kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas.

Keterlibatan aktor komunitas seperti Karang Taruna dalam pelaksanaan KATANA belum diimbangi dengan sistem evaluasi yang mampu mengukur efektivitas peran tersebut secara objektif. Kondisi ini menyulitkan proses identifikasi masalah dan penyusunan langkah perbaikan yang tepat. Temuan ini menggambarkan bahwa keberlanjutan KATANA sangat bergantung pada sistem evaluasi yang terstruktur dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan suatu model dalam mengevaluasi program KATANA. Dalam konteks inilah modul JuRRagan menjadi rujukan penting bagi penyusunan program KATANA di Kota Bekasi, karena modul tersebut dirancang sebagai pedoman nasional untuk memperkuat kapasitas keluarga melalui pendampingan yang sistematis.

Dalam modul JuRRagan dijelaskan bahwa ketangguhan keluarga dibangun melalui lima modul teknis yang meliputi pengenalan risiko bencana, rumah aman bencana, rencana siaga keluarga, sistem peringatan dini, serta evakuasi mandiri. Modul JuRRagan berperan sebagai pedoman resmi BNPB yang mendampingi proses pembentukan KATANA baru melalui mentoring, asistensi, serta penilaian berkala. Pendekatan sistemik ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada penyediaan materi, tetapi juga pada pendampingan aktif, kolaborasi lintas lembaga, serta mekanisme pemantauan yang berkesinambungan. Dengan

mengacu pada struktur, strategi operasional, dan standar kompetensi yang ditetapkan dalam modul JuRRagan, program KATANA di Kota Bekasi dapat dikembangkan secara lebih terarah dan terukur, sehingga mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di wilayah rawan banjir seperti Kelurahan Duren Jaya.

Terdapat berbagai macam model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi sebuah program, dan salah satunya yang paling populer adalah model evaluasi Kirkpatrick. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Daniel L. Kirkpatrick pada tahun 1959. Model ini memberikan cara yang terstruktur untuk menilai seberapa efektif sebuah program, dengan melibatkan empat tingkat evaluasi yang saling terkait satu sama lain. Model ini membagi evaluasi pelatihan menjadi empat tingkatan yang saling terkait. Tingkat pertama adalah *reaction*, yaitu mengukur bagaimana peserta merasa dan seberapa puas mereka dengan pelatihan yang diikuti. Tingkat kedua adalah *learning*, yang meninjau perubahan yang terjadi di dalam diri peserta, seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang meningkat selama pelatihan. Tingkat ketiga adalah *behavior*, yang menilai sejauh mana perubahan tingkat kesiapan peserta dalam menerapkan praktik kesiapsiagaan bencana setelah mengikuti program KATANA dalam kehidupan nyata. Terakhir adalah tingkat keempat yaitu *result*, yang mengevaluasi hasil akhir yang muncul sebagai dampak dari pelatihan, baik bagi individu maupun organisasi. Keseluruhan tingkatan ini membentuk suatu sistem evaluasi yang lengkap untuk memahami seberapa efektif suatu pelatihan secara menyeluruh.³

Terdapat beberapa penelitian yang meninjau bagaimana efektivitas program pelatihan dengan menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Salah satunya adalah penelitian oleh Hidayat dkk. (2023) yang mengevaluasi pelatihan penggunaan EYD V di SMK Broadcasting Mahardika. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pelatihan berjalan efektif di semua tingkatan evaluasi, mulai dari respons peserta yang positif, peningkatan pengetahuan selama proses pembelajaran,

³ Friyadi, R., Zakir, S., & Ilmi, D. (2025). EVALUASI PROGRAM DAURAH (PELATIHAN) TAHSIN DI MARKAZUL QURAN BUKITTINGGI MENGGUNAKAN METODE KIRKPATRICK. Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir, 2(1), 169-177.

perubahan perilaku siswa dalam menerapkan aturan bahasa, hingga hasil akhir berupa peningkatan kemampuan menggunakan ejaan dalam tugas penyiaran.⁴ Penelitian lain yang dilakukan oleh Susanty (2022) juga menunjukkan efektivitas yang kuat, terutama di tingkat pertama dan kedua, peserta pelatihan Bimtek SAKIP merasa puas dengan fasilitator dan penyelenggara pelatihan, serta mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah mengikuti pelatihan.⁵ Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa Model Evaluasi Kirkpatrick efektif digunakan untuk menilai pelaksanaan program pelatihan di bidang pendidikan dan administrasi, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konteks pelatihan formal di lingkungan sekolah atau lembaga birokrasi, dengan penekanan utama pada peningkatan pengetahuan dan kepuasan peserta.

Penelitian yang secara khusus menerapkan Model Kirkpatrick untuk mengevaluasi program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat khususnya pada konteks wilayah rawan banjir dan melibatkan partisipasi pemuda seperti Karang Taruna masih relatif terbatas. Selain itu, pengukuran pada level perilaku dalam penelitian-penelitian sebelumnya umumnya dilakukan berdasarkan perubahan perilaku aktual sedangkan dalam konteks kebencanaan yang bersifat situasional dan tidak selalu terjadi, pengukuran yang lebih relevan adalah pada kesiapan dan kecenderungan perilaku peserta dalam menghadapi potensi bencana. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan evaluasi program KATANA di Kelurahan Duren Jaya menggunakan Model Kirkpatrick secara komprehensif dengan menyesuaikan pengukuran pada setiap level evaluasi terhadap karakteristik program dan kondisi kebencanaan setempat.

Sistem monitoring dan evaluasi yang baku yang belum terlaksana menunjukkan bahwa keberlanjutan program KATANA sangat bergantung pada proses evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Ketiadaan

⁴ Hidayat, R., Alam, B. P., Lutvaidah, U., & Santosa, P. P. P. (2023). Implementasi Evaluasi Model Kirkpatrick Pada Program Pelatihan Penggunaan EYD V SMK Broadcasting Mahardika. *Abdi Jurnal Publikasi*, 1(5), 436-441.

⁵ Susanty, Y. (2022). Evaluasi program pengembangan kompetensi berdasarkan model evaluasi Kirkpatrick level 1 dan level 2. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 172-191.

instrumen evaluasi yang konsisten menyulitkan pengukuran peningkatan kapasitas warga serta menghambat proses identifikasi masalah dan penyusunan langkah perbaikan yang tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya mengukur keberhasilan program secara menyeluruh, terutama untuk melihat seberapa besar KATANA mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan banjir seperti Kelurahan Duren Jaya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) di Kelurahan Duren Jaya, Kota Bekasi. Program dilakukan menggunakan pedoman pada modul JuRRagan serta evaluasi program ini dilakukan dengan Model Kirkpatrick empat tingkat (*reaction, learning, behavior, dan result*).

Model ini memungkinkan penilaian dilakukan mulai dari tingkat kepuasan anggota Karang Taruna terhadap kegiatan KATANA, peningkatan pemahaman dan keterampilan yang didapat, perubahan sikap warga dalam menghadapi kondisi darurat, hingga hasil akhir berupa peningkatan ketangguhan komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner berbasis skala Likert, yang merupakan metode yang umum digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi responden terhadap suatu fenomena.⁶ Melalui evaluasi ini, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil dari program KATANA sehingga dapat diturunkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan dan keberlanjutan program di masa depan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program KATANA belum didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang baku sehingga hasil dari program, perkembangan kapasitas warga, dan kebutuhan perbaikan tidak dapat diukur secara objektif.

⁶ Sumartini, S., Harahap, K. S., & Sthevany, S. (2020). Kajian pengendalian mutu produk tuna loin precooked frozen menggunakan metode skala likert di perusahaan pembekuan tuna. Aurelia Journal, 2(1), 29-38.

2. Kelurahan Duren Jaya memiliki risiko banjir yang tinggi karena wilayahnya berbentuk cekungan, sehingga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui program KATANA menjadi hal yang sangat penting dan mendesak.
3. Belum ada penelitian evaluasi yang mengukur sejauh mana program KATANA berhasil di Kelurahan Duren Jaya dengan menggunakan Model Evaluasi Kirkpatrick, sehingga belum ada gambaran lengkap tentang kepuasan anggota Karang Taruna, peningkatan pemahaman, perubahan sikap, serta hasil akhir program tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian memiliki fungsi untuk menghindari meluasnya pokok bahasan di dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya mengevaluasi pelaksanaan Program KATANA di Kelurahan Duren Jaya, Kota Bekasi, khususnya pada wilayah RW 10 dan RW 11 yang berdasarkan hasil wawancara merupakan wilayah paling rentan terdampak banjir, sehingga tidak membahas pelaksanaan Program KATANA di kelurahan, RW, atau wilayah lain.
2. Subjek penelitian dibatasi pada anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11 Kelurahan Duren Jaya yang terlibat langsung dalam kegiatan program KATANA, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada masyarakat yang tidak mengikuti program tersebut atau pada wilayah lain di luar Kelurahan Duren Jaya.
3. Penelitian ini dibatasi pada evaluasi program KATANA menggunakan Model Evaluasi Kirkpatrick empat tingkat (*reaction, learning, behavior, dan result*) dengan mengacu pada modul JuRRagan, sehingga tidak membahas aspek kebijakan, pendanaan, atau perencanaan program di tingkat pemerintah daerah maupun nasional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepuasan anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11 Kelurahan Duren Jaya terhadap pelaksanaan program KATANA?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11 Kelurahan Duren Jaya dalam kesiapsiagaan bencana setelah mengikuti program KATANA yang berpedoman pada modul JuRRagan?
3. Bagaimana perubahan kesiapan perilaku anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11 Kelurahan Duren Jaya dalam kesiapsiagaan bencana setelah mengikuti kegiatan program KATANA?
4. Bagaimana hasil akhir pelaksanaan Program KATANA yang dirasakan oleh anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11 Kelurahan Duren Jaya dalam meningkatkan ketangguhan komunitas dan mengurangi risiko bencana banjir?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat kepuasan anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11 Kelurahan Duren Jaya terhadap pelaksanaan program KATANA.
2. Mengetahui tingkat pengetahuan anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11 Kelurahan Duren Jaya dalam kesiapsiagaan bencana setelah mengikuti program KATANA dengan panduan modul JuRRagan.
3. Mengetahui perubahan kesiapan perilaku anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11 Kelurahan Duren Jaya dalam menghadapi situasi darurat setelah berpartisipasi dalam program KATANA.
4. Mengetahui hasil akhir pelaksanaan Program KATANA yang dirasakan oleh anggota Karang Taruna RW 10 dan RW 11 Kelurahan Duren Jaya terkait peningkatan ketangguhan komunitas dan pengurangan risiko bencana banjir.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian mengenai evaluasi program kebencanaan, khususnya melalui penerapan Model Evaluasi Kirkpatrick pada konteks kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas evaluasi program berbasis komunitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Bekasi dan BPBD

Penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan dan penguatan pelaksanaan Program KATANA, terutama pada aspek kepuasan peserta, peningkatan pengetahuan, perubahan kesiapan perilaku, dan hasil akhir program.

b. Bagi Kelurahan Duren Jaya

Hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan KATANA, memperbaiki mekanisme pelatihan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hasil dari program KATANA dalam meningkatkan kesiapsiagaan warga, sehingga dapat mendorong anggota Karang Taruna untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana berbasis komunitas.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai pengevaluasian program kebencanaan dengan pendekatan yang lebih luas, metode yang lebih dalam, atau uji coba model evaluasi lainnya sebagai acuan perbandingan.